



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARDISON MAHYUDDIN**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **40099**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PARIAMAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.063.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOBIL, TOYOTA PICK UP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. MOTOR, HONDA FORZA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
5. MOTOR, YAMAHA N MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RAIZE MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 82.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.113.934.904



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.259.434.904
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.259.434.904

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.